



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah/ Kawin yang diajukan oleh :

KAMARULLAH BIN HADAN, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 05 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004, Nomor 003, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

RUSDIAH BINTI SARKAWI, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 02 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004, Nomor 003, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B, dengan Nomor perkara 228/Pdt.P/2023/PA.Amt, pada tanggal 23 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Murdiati binti Kamarullah
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat tanggal lahir : Rantau Bujur, 16 Juni 2006
Umur : 17 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ikut orang tua
Status : Perawan
Tempat kediaman di : RT. 004, Nomor 003, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

dengan calon suaminya :

Nama : Arpan bin Husni
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat tanggal lahir : Hulu Sungai Utara, 10 Juni 2004
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Jalan Tembok Baru, RT. 006, RW. 002, Desa Murung Panti Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 2 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat- syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor : 256/Kua.17.07-07/PW.01/11/2023 tanggal 15 November 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 tahun 1 bulan, menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun serta telah bertunangan selama 7 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan cukup perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon istriya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Murdiati binti Kamarullah) untuk menikah dengan Arpan bin Husni;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandungnya dibawah usia perkawinan, dan bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup usia, ditakutkan akan berdampak pada kesehatan anak, dan masalah sosial lainnya karena pola pikir belum dewasa yang dimungkinkan juga akan berdampak munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan, dan perceraian namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan pihak- pihak yang terkait sebagai berikut diantaranya :

Anak Kandung Para Pemohon :

Nama : **Murdiati binti Kamarullah**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah kenal sekitar 1 (satu) tahun, 7 bulan, dan hubungan sebegitu eratnya, kemudian telah tunangan sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir ini, dengan calon suaminya yang bernama Arpan bin Husni;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun, 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, dan saling mengunjungi dalam satu minggu sekitar 3 kali bertemu, untuk jalan- jalan dan makan- makan diluar, serta sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, tidak ada paksaan dari siapapun dan murni dari kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah mampu hidup berumah tangga, dan suaminya sudah mempunyai bekerja dan penghasilan, orangtua dan keluarga calon suaminya sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri;
- Bahwa ia siap dibimbing oleh calon suaminya dalam rumah tangga nantinya;

Calon Suami anak Para Pemohon :

Nama : **Arpan bin Husni**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai calon suami anak Para Pemohon dan telah kenal dan pacaran sekitar 1 (satu) tahun, 7 bulan, telah pula bertunangan sekitar 7 bulan terakhir ini;

Halaman 5 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku berusia 19 tahun, dan mengaku saling mencintai dengan anak Para Pemohon, dan hubungan sangat erat, serta sering saling mengunjungi, dalam satu minggu sekitar 3 kali bertemu untuk jalan- jalan dan makan- makan diluar;
- Bahwa ia sudah siap dan mampu hidup berumah tangga hidup mandiri dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) perbulan, dan akan selalu membimbing isterinya nanti;
- Bahwa ia berjanji selalu sabar dalam membina rumah tangganya nanti;

Calon Ayah dan Ibu Mertua anak Para Pemohon :

Nama : Husni bin Hamsi, dan Wahidah binti H. Salim, Agama Islam, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan mengaku sebagai ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, dan tidak keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa mereka telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan dengan anak kandungnya, dan harus segera dikawinkan;
- Bahwa keduanya telah lama kenal dan pacaran sudah 1 tahun, 7 bulan, dan telah pula bertunangan sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir ini, keduanya saling kunjung mengunjungi, sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan ia selaku ayah kandung siap

Halaman 6 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

- Bahwa ia sebagai ayah dan ibu tidak keberatan dan siap untuk membimbing anak- anaknya dalam berumah tangga nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis/ surat- surat sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Kamarullah, Nomor: 470/207/RB-BJ, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantau Bujur, tanggal 23 November 2023, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdiah, Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 07 Desember 2012, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 24 Mei 2013, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-3);
- Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kamarullah bin Hadan dan Rusdiah binti Sarkawi, tanggal 23 November 2023, bukti tersebut asli, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-4);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Murdiati, Nomor 6308-LT-04102013-0003, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 7 Oktober 2013, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-5);
- Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Murdiati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasussalam Hulu Sungai

Halaman 7 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Nomor 006/MI-17.07.48/PP.01.1/05/2018, tanggal 24 Mei 2018, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-7);

- Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/599/TU-PKM-BJG//2023, tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Banjang, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-6);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arpan, Nomor 6308/CLT0102201007385, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 1 Februari 2010, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-8);
- Fotokopi Surat Dispensasi Permohonan Kawinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "AGUNG BERSERI" Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 22 November 2023, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-9);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Nomor 256/Kua.17.07-07/PW.01/11/2023 tanggal 15 November 2023, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-10);

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan keterangan lain lagi dan memohon secara lisan agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan akan menikah/ mengawinkan anak kandungnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas, menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut, memohon agar dapat diberi dispensasi kawin kepada anak kandungnya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena belum cukup usia kawin, oleh karenanya para pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Nasihat kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada para pemohon, anak para pemohon dan orang tua (Ayah dan ibu) calon suami anak para pemohon yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, kewajiban belajar 12 tahun, Kesehatan re-produksi, dampak ekonomi, social dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan pihak- pihak terkait.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 10 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung para pemohon dan calon suaminya,

Halaman 9 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan kalau mereka berdua sering saling mengunjungi dan harus segera dikawinkan mengingat keduanya telah berpacaran, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak kandung para pemohon yang pada pokoknya merestui perkawinan anak kandungnya dengan anak Para Pemohon, mengingat keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan telah pula mendaftar kehendak menikah namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditolak karena anak Para Pemohon masih dibawah umur perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang yakni 19 tahun;

Kesimpulan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pokok dalil- dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon dalam posita 1 (satu) masih berumur 17 tahun, 5 bulan, sehingga menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku belum memenuhi ketentuan syarat- syarat pernikahan;
2. Bahwa kehendak kawin ini perlu Penetapan atau Izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti (P-1 s/d P-10), bukti- bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Komitmen, bukti- bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, diterbitkan oleh pejabat yang

Halaman 10 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, kecuali bukti P-4, bukti- bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, baik secara formal maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti para pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon mempelai perempuan bernama **Murdiati**, sehingga harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya tersebut, dan telah berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab atas anak- anaknya nanti dalam masa- masa perkawinan/ berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7, berupa fotokopi Akta Kelahiran, Izajah dan Surat Keterangan Kesehatan, AN. **Murdiati binti Kamarullah**, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka senyatanya **Murdiati binti Kamarullah**, lahir pada 16 Juni 2006, sehingga masih berusia 17 tahun, 5 bulan, menamatkan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, telah pula dinyatakan “sehat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, berupa fotokopi Akta Kelahiran, AN. **Arpan bin Husni**, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka senyatanya lahir pada 10 Juni 2004, sehingga telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, berupa fotokopi Surat Dispensasi Permohonan Kawin dan Laporan Hasil Konseling, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Hulu Sungai Utara, bukti

Halaman 11 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka kedua calon pengantin pun telah dikonseling, sebagaimana bukti tersebut dan pada bukti tersebut calon pengantin wanita disarankan agar menunda pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P-10, adalah foto kopi surat pemberitahuan penolakan nikah, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang menerangkan bahwa anak kandung para pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, Jika bukti P-5, dihubungkan dengan bukti P-10 tersebut, maka terbukti anak kandung Para Pemohon **belum memenuhi syarat dari segi usia** untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, keterangan pihak- pihak terkait, serta P-1 s/d P-10, yang telah diperiksa di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama : **Murdiati binti Kamarullah**, dengan calon suaminya **Arpan bin Husni**;

Halaman 12 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah menolak permohonan perkawinan anak kandung para pemohon karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, saat ini anak kandung Para Pemohon berumur 17 tahun, 5 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa, hubungan anak kandung para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga khawatir menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa para pemohon dan orangtua calon suami anak kandung para pemohon telah dihadirkan, dan semua mengatakan siap membimbing anak-anak mereka nanti dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 tersebut dimana anak Para Pemohon mendapat rekomendasi untuk tidak diizinkan menikah/ kawin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak cq. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), namun dan menunda perkawinan karena belum siap secara mental, fisik dan pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut hakim para pemohon telah berhasil membuktikan adanya kekurangan usia dan alasan mendesak anak kandung para pemohon yang bernama **Murdiati binti Kamarullah**, sedangkan penolakan pendaftaran perkawin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, beralasan, karenanya atas 2 (dua) alasan tersebut hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika perkara permohonan Dispensasi Kawin/ Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pekawinan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan “

Halaman 13 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan, sebagaimana bunyi pasal tersebut pada ayat (2), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa tentang pembatasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar secara mental dan fisik calon mempelai laki- laki ataupun calon mempelai wanita telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan atau seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai dalam perkara dispensasi kawin yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya kekurangan batas usia perkawinan (bukti P-10), bukan pada rukun perkawinan/ pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan rukun dalam hal pendaftaran kawin/ nikah maka itu kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga dalam perkara dispensasi kawin/ nikah, hakim memeriksa pada batasan usia menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut diatas, dan untuk menghindari hal negatif dan atau kemungkinan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka anak kandung para pemohon perlu dikawinkan mengingat keduanya sering saling mengunjungi serta erat hubungan keduanya, dan Hakim bukan untuk mengenyampingkan bukti P-9 tersebut, namun bukti P-9 itu telah pula membuktikan bahwa kedua calon mempelai khususnya anak Para Pemohon telah di konseling;

Halaman 14 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat anak kandung para pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على المرعية منوط بالمصاحبة

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemashlahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon sebagaimana petitum Nomor 1, dan 2 patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung para pemohon yang bernama **Murdiati binti Kamarullah**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Arpan bin Husni**, didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Halaman 15 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama : **Murdiati binti Kamarullah**, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki bernama : **Arpan bin Husni**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Penutup.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera,

Ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S. Ag., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | Rp 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 400.000,00

Terbilang : "empat ratus ribu rupiah"

Halaman 17 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)